

Koordinasi Ke Dinas PMD Terkait Data Perangkat Desa dan Pengurus BPD Desa Dabulon

Dabulon.simsa.id, Selasa (05/11/2024); Dalam upaya memperkuat tata kelola dan pengembangan Desa Dabulon, Pemerintah Desa Dabulon baru-baru ini mengadakan koordinasi penting dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Nunukan. Fokus utama dari pertemuan ini adalah sinkronisasi dan penguatan data perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Dabulon. Dengan adanya koordinasi yang berkelanjutan, pemerintah desa dan DPMD berharap dapat mendorong efektivitas pelayanan publik, meningkatkan tata kelola desa, serta mendukung sinergi yang lebih kuat antara desa dan dinas terkait.

Dalam kegiatan koordimasi tersebut Kepala Desa Dabulon Anuar Sadat di terima langsung oleh Ir. Muh. Akib Makmur Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda. Kedatangan Kepala Desa Dabulon Anuar Sadat di terima dengan baik serta banyak hal yang di bahas dalam koordinasi tersebut selain dari data Perangkat Desa dan BPD Desa Dabulon

Data perangkat desa dan data anggota BPD Desa Dabulon yang tersimpan di DPMD Nunukan mencakup berbagai informasi penting, antara lain:

1. **Identitas Perangkat Desa dan Pengurus BPD;** Data ini meliputi nama lengkap, jabatan, alamat, dan NIK dari masing-masing perangkat desa dan pengurus BPD. Informasi yang akurat mengenai identitas perangkat dan anggota BPD sangat penting untuk mendukung berbagai layanan yang membutuhkan verifikasi administrasi.
2. **Data Kepegawaian dan Keanggotaan;** Dalam database DPMD, setiap perangkat desa dan anggota BPD memiliki data mengenai tanggal pengangkatan, status perangkat maupun anggota BPD, serta riwayat pelatihan atau pendidikan yang telah diikuti. Ini bermanfaat untuk mendukung pengembangan profesional perangkat desa dan memastikan bahwa mereka memenuhi kualifikasi yang diatur dalam peraturan.
3. **Informasi Kesejahteraan dan Jaminan Sosial;** Data terkait program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan juga tercatat di DPMD. Data ini membantu memantau

kepesertaan perangkat desa dan BPD dalam program jaminan sosial yang disediakan pemerintah, yang menjadi bagian dari upaya menjaga kesejahteraan aparat desa.

4. **Database Kinerja dan Evaluasi;** DPMD juga menyimpan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah desa dan BPD dari waktu ke waktu. Informasi ini membantu desa dan DPMD melakukan evaluasi berkala terhadap capaian program-program desa, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.

Maksud dan Tujuan Koordinasi

Koordinasi antara Desa Dabulon dan DPMD Nunukan bertujuan untuk memperkuat berbagai aspek dalam tata kelola dan pembangunan desa, yang meliputi:

1. **Memperbarui dan Menyinkronkan Data Perangkat Desa dan BPD;** Dengan memperbarui data secara berkala, DPMD dan pemerintah desa dapat memastikan bahwa informasi yang ada selalu akurat. Hal ini penting agar perangkat desa dan pengurus BPD terdaftar dengan benar di berbagai program pemerintah, khususnya dalam jaminan sosial dan kesejahteraan.
2. **Memperkuat Tata Kelola Desa;** Data yang akurat menjadi dasar untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan koordinasi ini, pemerintah desa dapat lebih mudah mengakses bantuan teknis dari DPMD dalam menjalankan tugas-tugas administratif.
3. **Mendukung Pengembangan dan Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa;** Melalui basis data yang tersinkronisasi, pemerintah desa dan DPMD dapat bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan kapasitas, atau dukungan lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja perangkat desa dan pengurus BPD.
4. **Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa;** Data yang valid memungkinkan pemerintah desa dan DPMD untuk merencanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan desa, sekaligus mempermudah pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program-program tersebut.

Perkembangan Desa dan Tata Kelola Desa

Perkembangan Desa Dabulon sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan sinergi yang kuat dengan DPMD. Dalam konteks ini, pemerintah desa terus berupaya memperbarui sistem tata kelola yang berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Dengan adanya sinkronisasi data perangkat desa dan BPD, pemerintah desa memiliki landasan yang lebih kokoh untuk merencanakan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dari segi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial.

Tata kelola desa yang baik mencakup penyusunan anggaran yang transparan, pelaksanaan program yang akuntabel, serta partisipasi aktif dari masyarakat. Dengan dukungan Dinas PMD, Desa Dabulon berharap dapat meningkatkan kapasitas perangkat desa dalam mengelola administrasi, mengoptimalkan pelayanan publik, dan memastikan implementasi program desa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sinergi antara Pemerintah Desa Dabulon dengan Dinas PMD Nunukan

Sinergi yang erat antara Pemerintah Desa Dabulon dan Dinas PMD Nunukan menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan yang efektif. Beberapa bentuk sinergi yang dilakukan meliputi:

- **Pendampingan dan Pelatihan Perangkat Desa;** Dinas PMD memberikan pendampingan kepada perangkat desa, termasuk pelatihan mengenai pengelolaan administrasi, pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan desa, serta penguatan kompetensi kepemimpinan. Pendampingan ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja perangkat desa secara signifikan.
- **Konsultasi dan Penyediaan Informasi;** Pemerintah Desa Dabulon dapat secara langsung berkonsultasi dengan Dinas PMD dalam hal pengembangan desa, terutama mengenai perencanaan dan pelaksanaan program desa. Dinas PMD juga menyediakan informasi mengenai regulasi terbaru yang harus dipatuhi oleh pemerintah desa.
- **Penyelarasan Program dan Kebijakan;** Dengan adanya koordinasi yang intens, Pemerintah Desa Dabulon dan Dinas PMD dapat menyelaraskan program-program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa, misalnya dalam hal

alokasi dana desa dan pelaksanaan proyek-proyek yang didanai oleh pemerintah pusat atau daerah.

Manfaat dari Sinkronisasi Data dan Koordinasi dengan Dinas PMD

Sinkronisasi data perangkat desa dan pengurus BPD memberikan sejumlah manfaat penting bagi Desa Dabulon, di antaranya:

1. **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik;** Dengan data yang tersinkronisasi dan valid, perangkat desa dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
2. **Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas;** Data yang valid dan tersimpan dengan baik di DPMD mendukung transparansi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program. Masyarakat dapat lebih mudah memantau dan menilai kinerja pemerintah desa.
3. **Mempermudah Akses Program Kesejahteraan dan Sosial;** Sinkronisasi data ini memudahkan perangkat desa dan BPD dalam mengakses program kesejahteraan, termasuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan sosial ini sangat penting dalam menjaga kesejahteraan perangkat desa dan pengurus BPD.
4. **Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Pemerintah Desa;** Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa dan DPMD, perangkat desa mendapatkan dukungan dalam peningkatan kapasitas kerja mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
5. **Peningkatan Efisiensi Administrasi Desa;** Sinkronisasi data memastikan bahwa data administrasi perangkat desa dan BPD selalu terkini dan terverifikasi, sehingga proses administratif berjalan lebih lancar dan minim kesalahan.

Kesimpulan

Koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa Dabulon dengan Dinas PMD Nunukan adalah langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan desa yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan sinkronisasi data perangkat desa dan BPD, Desa Dabulon dapat mengoptimalkan pelayanan publik, memastikan keanggotaan jaminan sosial perangkat desa, dan membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Sinergi yang kuat

antara pemerintah desa dan Dinas PMD diharapkan terus berkembang agar Desa Dabulon dapat menjadi desa yang maju dan mandiri, dengan pemerintahan yang lebih efektif dan melayani masyarakat dengan lebih baik.